

## **Analisis Pasal 16a *Convention on the Elimination of Discrimination Against Woman (CEDAW)* Dalam Hukum Keluarga di Thailand**

**Wahyuni Retnowulandari**

Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia 11440

Email: Retnowulandari\_61@yahoo.com

### **Abstract**

*Equity in marriage and is fairly relations is one of the verses in Convention on the Elimination of Discrimination Against Woman (CEDAW) which must be applied in any State laws that have ratified CEDAW. Thailand as one of the countries in ASEAN's unique because it has never been colonized and the Buddhist majority and Muslim minority have ratified CEDAW. Therefore, this study illustrates how the rights of men and women to enter marriage in family law in Thailand, whether they can apply it well in Thai society legislation and "Thai Muslims" and is there any obstacles to implementation. From the analysis of the normative studies can be drawn that the Civil Code Family Law Article 16a of Thailand has adopted a de jure, except for the people of South Thailand, "Thai Muslims" are not subject to the Civil Code, but rather use the Sharia. The main obstacle in its application is the politics and culture / religion that has been rooted in tradition.*

**Keywords:** CEDAW, Women Rights, Thailand

### **Abstrak**

*Equity in marriage and fairly relation (hak yg sama untuk memasuki jenjang perkawinan) adalah salah satu ayat dalam Convention on the Elimination of Discrimination Against Woman (CEDAW) atau Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang harus diterapkan dalam setiap peraturan perundangan negara yang telah meratifikasi CEDAW. Thailand sebagai salah satu negara di ASEAN yang unik karena tidak pernah dijajah, dengan mayoritas penduduknya bergama Budha dan minoritas Islam telah meratifikasi CEDAW. Bagaimana hak laki-laki dan perempuan untuk memasuki perkawinan dalam hukum keluarga di Thailand, apakah mereka dapat menerapkannya dengan*



baik di peraturan perundangan masyarakat Thai dan “Thai muslim” serta adakah kendala-kendala dalam penerapannya. Dari analisis kajian normatif, dapat digambarkan bahwa Code Civil Hukum Keluarga Thailand telah menerapkan Pasal 16a secara *de jure*, kecuali untuk masyarakat Thailand Selatan “Thai Muslim” yang tidak tunduk pada Code Civil tersebut, melainkan menggunakan ketentuan Syaria’ah. Kendala yang utama dalam penerapannya adalah politik dan budaya/agama yang telah mengakar secara tradisi.

**Kata kunci:** CEDAW, Hak Perempuan, Thailand

## PENDAHULUAN

Penelitian dengan judul “Analisis Pasal 16a CEDAW dalam Hukum Keluarga di Thailand” ini dilakukan atas dasar keinginan Peneliti menggambarkan mengenai bagaimana negara Thailand sebagai salah satu negara ASEAN tetangga Indonesia yang telah meratifikasi *Convention on the Elimination of Discrimination Against Woman* (yang selanjutnya disingkat dengan CEDAW) atau Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dalam menerapkannya pada peraturan perundang-undangan (khususnya *family law*) mereka. Karena sebagaimana diketahui Indonesia yang juga sudah meratifikasi CEDAW, dalam penerapan CEDAW dalam Undang-undang Perkawinan masih belum sebagaimana yang diharapkan, walaupun di beberapa hal sudah ada kesetaraan. Terlebih lagi secara *de facto*, masih sulit untuk dilaksanakan disebabkan karena faktor politik, sosial, budaya, serta Agama yang mempengaruhi penerapannya dalam ketentuan formal Negara. Uraikan penelitian ini, sesuai dengan tujuannya yaitu untuk dapat menggambarkan *Family of law Thailand* khususnya mengenai hak yang sama memasuki jenjang perkawinan dalam Hukum Keluarga yang dilihat dari perspektif CEDAW untuk kemudian diambil manfaatnya oleh peneliti sebagai masukan revisi Undang-undang Perkawinan di Indonesia (selanjutnya disingkat dengan UUP). Penelitian ini sengaja dibatasi sedemikian rupa semata-mata untuk lebih memfokuskan bahan kajian.



Thailand / Siam adalah negara kerajaan di ASEAN yang mayoritas beragama Buddha. Namun pemimpinnya harus memikirkan juga masyarakat di Thailand Selatan yang Muslim. Walaupun muslim di Thailand minoritas, mereka memiliki kerajaannya sendiri di wilayah selatan. Karena sejak masuknya Islam di Thailand Selatan pada awal Abad 19 bersamaan dengan diterima baiknya Islam di Malaka, Aceh, Melayu Peninsula, dan kemudian menyebar di Asia Selatan seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Philipina Selatan, Islam menjadi bagian dari masyarakat adatnya<sup>1</sup>. Karena sebagaimana diketahui bahwa Islam masuk di wilayah Asia Tenggara tidak masuk melalui kekerasan sehingga sangat mudah diterima oleh masyarakat karena tidak merubah peradaban yang ada, di samping relatif sama dengan budaya setempat.

Namun agak berbeda dengan negara-negara tetangga terdekatnya seperti Malaysia dan Indonesia yang masyarakat muslimnya mayoritas. Islam di Thailand sebagaimana Islam di Moro Philipina merupakan kelompok yang minoritas, maka tidak jarang untuk mempertahankan eksistensi, mereka harus melakukan pemberontakan pada pemerintah pusat. Oleh karena itu pula Thailand mempunyai kesamaan dengan negara-negara tetangga yang dijajah negara Eropa, dimana Islam juga menjadi bagian yang mempengaruhi hukum di negara-negara tetangga tersebut. Sehingga tidak mengherankan apabila Thailand juga menganut dualisme ketentuan hukum keluarga, sebagaimana Malaysia, Philipina, Singapura. Sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana negara-negara di ASEAN lain, baik yang minoritas beragama Islam maupun yang mayoritas, dimana hukum keluarganya digunakan dan atau sangat dipengaruhi oleh Hukum Islam, tidak mudah menerapkan CEDAW secara *de jure* dan *de facto* terutama di lingkungan masyarakat muslim. Ketika Thailand yang dalam proses modernisasi hukum telah meratifikasi CEDAW yang

---

1 Thanet Phonsavan "Politics of the Muslims in Thailand/Thanet1 Revisi 12/2/03 <https://seap.einaudi.cornell.edu/sites/seap/files/MuslimThailand.pdf>



artinya Pemerintah Thailand berkewajiban menerapkan CEDAW secara *de jure* dan *de facto*, namun dalam penerapannya masih terkendala berbagai faktor.

Oleh sebab itu penelitian ini mengkaji hukum keluarga Thailand khususnya mengenai hak yang sama memasuki jenjang perkawinan yang disinkronkan dengan CEDAW Pasal 16a untuk dapat dianalisis apakah pemerintah Thailand dapat menerapkan kesetaraan hak calon suami istri dalam hukum keluarga.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan Pasal 16a CEDAW dalam *Family Law of Thailand*?
2. Kendala-kendala apa yang mungkin timbul dalam penerapan konvensi tersebut dalam hukum keluarga Thailand baik yang non muslim dan muslim?

### **Metode Pendekatan**

Penelitian ini merupakan analisis terhadap Hukum Keluarga Thailand. Khususnya mengenai hak yang sama memasuki jenjang perkawinan, dimana diketahui masyarakat Thailand yang mayoritas non Muslim dan minoritas muslim itu telah meratifikasi CEDAW. Untuk dapat menggambarkannya, penelitian ini dilakukan berdasarkan tipe penelitian normatif dalam hal ini penelitian terhadap asas-asas hukum, sinkronisasi hukum<sup>2</sup>. Artinya untuk menjawab pokok permasalahan penelitian ini, dilakukan dengan meneliti asas hukum keluarga Thailand *The Civil and Commercial Code* yang dalam Buku V mengatur mengenai *Family Law* khususnya mengenai hak yang sama memasuki jenjang perkawinan, seperti persyaratan menuju perkawinan, asas-asas hukum perkawinan dan lain-lain, serta sinkronisasi antara hukum keluarga tersebut dengan CEDAW.

---

2 Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.51.



Penelitian ini disusun secara sistematis dengan bentuk deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif sehingga penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan seteliti mungkin tentang *Code Civil Buku V Title I Marriage Chapter I Betrotal* dan *II Conditions of Marriage* yang terdiri dari *Section* 1435 sampai dengan 1464 mengatur tentang ketentuan yang berhubungan dengan hak memasuki jenjang perkawinan di Thailand yang analisisnya disinkronkan dengan CEDAW Pasal 16a, sehingga dapat diketahui ada tidaknya bias gender dalam hukum keluarga yang berupa *Code Civil: Family Law of Thailand* tersebut, serta pengaruh agama dan budaya dalam penerapannya.

Kerangka teori dari penelitian ini adalah Teori Triangular Concept of Legal Pluralism dari Werner Menski, yang menurutnya hukum sebagai fenomena global memiliki kesamaan di seluruh dunia. Dalam arti bahwa hukum dimana-mana terdiri dari atas dasar nilai etis, norma-norma sosial dan aturan-aturan yang dibuat oleh Negara. Meskipun tentu saja di dalam realitasnya, muncul banyak sekali variasi kultur yang lebih spesifik. Konsep ini dikenal dengan konsep segitiga pluralisme hukum (*triangular concept of legal pluralism*) dimana Menski mengkombinasikan secara interaktif teori hukum alam modern, positivism dan sosiologi hukum untuk membahas mengenai pluralism hukum yang merupakan realitas dunia global.<sup>3</sup>

## PEMBAHASAN

### Penerapan Pasal 16a CEDAW dalam *Family Law of Thailand*

Thailand adalah salah satu negara di ASEAN yang telah meratifikasi CEDAW. Penerapan CEDAW/ Konvensi Wanita di negara-negara ASEAN terutama yang telah meratifikasi konvensi, merupakan kewajiban.

---

3 Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana Prenada Media group, Jakarta, hlm. 184



Dari kajian Hukum keluarga Thailand digambarkan bahwa Pemerintah Thailand pada saat perayaan Tahun Wanita Internasional, menjamin hak-hak yang sama untuk pria dan wanita dalam Pasal 28 Ayat 2 Konstitusi BE 2517 (A.D.1974). Code Civil buku V (keluarga) telah direvisi prinsip-prinsipnya dan mulai diberlakukan pada tanggal 16 Oktober. B.E. 2519 (setelah Masehi 1976). Oleh karenanya dapat terlihat bahwa Pasal 16a CEDAW yang menekankan *Equity in marriage and family relation* (Hak yg sama untuk memasuki jenjang perkawinan) sudah sinkron dengan *Code Civil Buku V Title I Marriage Chapter I Betrothal* dan *II Conditions of Marriage* yang terdiri dari *Section* 1435 sampai dengan 1464 mengatur tentang ketentuan yang berhubungan dengan hak memasuki jenjang perkawinan di Thailand. Hal ini membuktikan bahwa hak perempuan dan laki-laki dalam memasuki jenjang perkawinan telah melindungi perempuan antara lain;

a. Ketentuan dalam Proses Pertunangan di Thailand

Berbeda dengan ketentuan di Indonesia, *Code Civil Buku V Title I Marriage Chapter I Betrothal* yang terdiri dari *Section* 1435 sampai dengan 1443, mengatur masa pertunangan. Dimana untuk bertunangan diatur sebagai berikut:

- 1). Pasangan yang bertunangan harus sama-sama berusia 17 tahun<sup>4</sup>.
- 2). Disyaratkan pertunangan harus dilakukan atas persetujuan orangtua, bila orang tua tidak ada baik karena meninggal dunia/ kehilangan kekuasaan orang tua/ karena anak angkat, maka harus persetujuan wali.<sup>5</sup>
- 3). Untuk bertunangan harus memberikan "property pertunangan " sebagai bukti bahwa mereka akan menikah, walaupun perkawinan tidak harus diawali dengan pertunangan.<sup>6</sup>

4 Code Civil and Commercial Code , Article 1435

5 Code Civil and Commercial Code , Article 1436.

6 Code Civil and Commercial Code, Article 1437.



Selain itu Code Civil Thailand juga memberi perlindungan hukum selama dalam masa pertunangan sebagai berikut:

- 1). Orang yang bertunangan dengan seorang wanita bisa mengklaim pemerkosaan dari orang yang telah melakukan hubungan seksual dengan wanita tersebut setelah dia telah dibatalkan perjanjian pertunangan.<sup>7</sup> Dia juga dapat mengklaim kompensasi dari orang lain yang diperkosa atau mencoba memperkosa tunangannya jika orang itu tahu atau seharusnya tahu bahwa perempuan tersebut telah bertunangan untuk penuntut tanpa pembatalan perjanjian pertunangan seperti yang dibutuhkan.<sup>8</sup>
- 2). Seorang wanita yang bertunangan tidak berhak mengklaim dari wanita lain yang pernah melakukan hubungan seksual dengan tunangannya. Dia hanya dapat menolak untuk menikah dengannya jika ia dapat membuktikan ada wanita lain sebagai suami dan istri atas dasar bahwa ia telah melakukan kesalahan dan membuat tidak cocok baginya untuk menikah dengannya. Dia bisa membatalkan pertunangan perjanjian tanpa mengembalikan “Khongman”, pemberian/hadiah pertunangan kepada orang itu<sup>9</sup>.
- 3). Sebuah janji untuk menikah tanpa memberikan pemberian kepada perempuan dapat menjadi bentuk lain kontrak menikahinya, yang bukan sebuah pertunangan. Jika salah satu pihak melakukan pelanggaran janji itu, pihak lain tidak berhak untuk mengklaim kompensasi. Namun untuk hal ini tidak ada ketentuan di bawah hukum keluarga Thailand.<sup>10</sup>

---

7 Code Civil and Commercial Code, Article 1439.

8 Code Civil and Commercial Code, Article 1445.

9 Code Civil and Commercial Code, Article 1443.

10 Supreme Court decision, No. 1971/2517.



b. Ketentuan Perkawinan di Thailand

*Code Civil Buku V Title I Marriage Chapter II Conditions of Marriage Section* 1448 sampai dengan 1464, mengatur perkawinan di Thailand sebagai berikut:

- 1). Untuk melangsungkan perkawinan kedua calon mempelai harus berusia 17 tahun, namun masih dimungkinkan pengadilan memberikan dispensasi.<sup>11</sup>
- 2). Perkawinan harus atas persetujuan orangtua atau wali (bila sudah kehilangan kekuasaan orangtua).<sup>12</sup> Larangan kawin dengan saudara sedarah, perkawinan antara keluarga dekat seperti di mana laki-laki dan perempuan adalah saudara sedarah di bawah kekuasaan langsung atau garis keturunan.<sup>13</sup> Dimana bila ada pernikahan yang bertentangan ketentuan ini, pengadilan akan memutuskan bahwa pernikahan tersebut adalah tidak sah.
- 3). Undang-undang juga melarang pernikahan antara orang tua yang mengadopsi dengan anak yang diadopsi, pernikahan yang melanggar ketentuan ini akan mengakibatkan pembubaran adopsi.
- 4). Perkawinan tidak bisa terjadi jika laki-laki atau perempuan adalah orang yang tidak sehat atau pikiran orang divonis tidak kompeten. Sebuah perkawinan bertentangan ketentuan ini tidak berlaku.
- 5). Perkawinan di Thailand berAsas Monogami Monogami sejak 1 Oktober 1935. Namun, poligami masih ada, dalam praktiknya, dan diterima, meskipun Undang-undang menyatakan:
  - a). Seorang pria atau seorang wanita tidak dapat menikah satu sama lain sambil salah satu dari mereka memiliki pasangan.

---

11 Code Civil and Commercial Code, Article 1448.

12 Code Civil and Commercial Code, Article 1454.

13 Code Civil and Commercial Code, Article 1450.



- b). Pendaftaran perkawinan diperlukan oleh hukum keluarga untuk memvalidasi pernikahan.

Hal ini karena sebelum 1 Oktober 1935 poligami secara bebas diperbolehkan di Thailand. Hukum keluarga saat itu mengklasifikasi istri tua di menjadi tiga kategori, sesuai dengan cara mereka menjadi istri<sup>14</sup>:

- a). "*Mia Glang Muang*" istri resmi seorang laki-laki yang diperoleh dari orang tuanya untuknya .
  - b). "*Mia Glang Norg*" istri muda adalah orang yang ia peroleh sendiri oleh seorang laki-laki setelah istri resminya.
  - c). "*Mia Glang Tasee*" istri budak, yang dibeli dari pemilik terdahulu oleh suami. Anak-anak yang lahir dari istri tersebut adalah anak sah, dan Pendaftaran pernikahan tersebut tidak disyaratkan bagi suami dan istri.
- 6). Kedudukan Suami dan Isteri dalam perkawinan;

Sebelum revisi Code Civil dan Commercial Code, Buku 5 (Keluarga) yang berlaku efektif pada tanggal 16 Oktober 1976, hukum keluarga yang lama menetapkan seorang wanita yang menikah tidak punya hak untuk mengelola harta milik bersama tanpa persetujuan dari suaminya, ketentuannya bahwa : "Suami adalah kepala Rumah tangga, memilih tempat tinggal dan mengarahkan apa yang harus dilakukan untuk pemeliharaan keluarga". Ketentuan ini sekarang telah dihapuskan. Suami dan istri memiliki hak yang sama untuk mengelola harta benda yang mereka peroleh bersama selama pernikahan.

---

14 By Wimolsiri Jamnarnwej(<http://www.thailawforum.com/articles/familywimol7.html>) part 2



7). Harta benda perkawinan, harta milik suami dan istri dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori berdasarkan harta benda perkawinan keluarga ini yaitu harta pribadi dan milik bersama .

a). Harta pribadi "*Sin Suan Tua*" terdiri dari:

- (1). harta milik pasangan baik sebelum menikah;
- (2). harta untuk penggunaan pribadi, pakaian atau gaun, dekorasi tubuh sesuai dengan status hidup, alat atau instrumen yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan atau profesi pasangan baik; kekayaan yang diperoleh oleh pasangan baik selama pernikahan maupun akan menikah yang disebut dengan; "*Khongman*" yaitu harta diberikan pada upacara pertunangan oleh pria kepada wanita sebagai bukti untuk menikah.

b). Harta bersama

- (1). semua kekayaan yang diperoleh oleh pasangan baik selama pernikahan;
- (2). kekayaan yang diperoleh oleh pasangan baik selama pernikahan berupa hadiah yang dituliskan dan dideklarasikan pada saat akan atau pada dokumen hadiah yang akan dimiliki bersama oleh kedua suami dan istri.

(3). Buah dari milik pribadi.

Dalam hal keragu-raguan apakah sebuah properti milik pribadi atau milik bersama, hukum menganggap properti yang menjadi milik bersama.



### Cara Mengelola harta benda/kekayaan perkawinan

Suami dan istri dapat memasukkan perjanjian perkawinan mengenai pengelolaan harta mereka pada saat pendaftaran pernikahan mereka. Ada tiga keterbatasan perjanjian perkawinan:

- a). perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum atau tidak bermoral;
- b). perjanjian tidak harus memberikan bahwa kekayaan tersebut harus diatur oleh hukum asing.
- c). perjanjian harus dalam bentuk tertulis, ditandatangani oleh kedua pasangan dan oleh paling tidak dua saksi dan tercatat pada saat pendaftaran perkawinan.

Setelah perkawinan, perkawinan tidak dapat diubah atau dibatalkan kecuali oleh otorisasi dari pengadilan. Jika pasangan itu tidak melakukan perjanjian perkawinan, pengaturan harta benda perkawinan mereka akan diatur oleh peraturan umum Hukum Keluarga sebagai berikut:

- a). Setiap pasangan memiliki hak untuk mengelola milik pribadinya.
- b). Setiap pasangan harus mengelola milik bersama secara bersama-sama atau dengan persetujuan dari pasangan lain dalam kasus berikut ini:
  - (1). Penjualan, pertukaran, jual dengan hak penebusan, membiarkan dan menjual pada jangka waktu sewa beli, penggadaian, melepaskan mortgage atau mentransfer hak mortgage pada harta tidak bergerak atau harta bergerak yang mortgagable;
  - (2). Menciptakan atau meniadakan keseluruhan atau sebagian dari perbudakan, hak untuk tempat tinggal, hak untuk pembelian, usul, pada harta tak bergerak;



- (3).Membiarkan harta tidak bergerak selama lebih dari tiga tahun;
- (4).Memberi pinjaman uang;
- (5).Memberi hadiah, dengan memperhatikan kepentingan keluarga dalam kehidupan untuk tujuan amal atau sosial, atau sesuai dengan kewajiban moral;
- (6).Membuat kompromi;
- (7).Menyerahkan persengketaan kepada arbitrase;
- (8).Menggunakan harta benda sebagai jaminan atau keamanan kepada petugas atau pengadilan.

Pengelolaan harta milik bersama yang lain dari yang diatur dapat dilakukan dengan pasangan baik tanpa persetujuan dari yang lain.

Jika salah satu pasangan telah melakukan tindakan hukum tersebut di atas tanpa persetujuan dari pasangan lain, tindakan hukum tersebut akan berlaku hanya bila telah dikonfirmasi oleh pasangan lain. Jika pasangan lain tidak memberikan persetujuan untuk tindakan yang bersangkutan atau tidak mengkonfirmasi hal itu, dia dapat mengajukannya sebagai kasus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mencabut tindakan hukum tersebut. Namun jika tampak bahwa pihak ketiga bertindak dengan itikad baik pada saat menyimpulkan tindakan hukum tersebut, tindakan tersebut tidak dapat dicabut. Hak untuk mencabut terbatas pada jangka waktu satu tahun dari waktu ketika pasangan ini menyadari penyebab pencabutan atau sepuluh tahun sejak tindakan hukum dilakukan.

Kekuasaan untuk mengelola milik bersama bersama antara suami dan istri tidak berarti bahwa pasangan harus meminta persetujuan dari



satu sama lain untuk setiap tindakan. Setiap pasangan pun memiliki kekuatan untuk mengelola urusan rumah tangga atau untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan bagi keluarga. Hutang yang dikeluarkan oleh pasangan selama pernikahan adalah hutang bersama yang mengikat kedua pasangan sama-sama, sebagai berikut;

- (1). hutang yang dikeluarkan untuk pengelolaan urusan rumah tangga yang diperlukan, sebagai pemeliharaan, dan biaya medis dari rumah tangga dan pendidikan yang layak anak-anak.
- (2). hutang yang terjadi sehubungan dengan milik bersama.
- (3). hutang yang terjadi sehubungan dengan bisnis yang dijalankan oleh pasangan yang sama.
- (4). hutang yang dikeluarkan oleh pasangan baik hanya untuk keuntungan sendiri, tetapi dikonfirmasi oleh yang lain.

Pada saat berakhirnya perkawinan, harta milik pribadi dikembalikan kepada masing-masing pasangan sama, pasangan Keduanya bertanggung jawab atas hutang umum untuk proporsi yang sama.

#### 8). Pemeliharaan/ Nafkah Keluarga

Suami dan istri memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan mendukung satu sama lain sesuai kemampuannya dan status kehidupan.

Status perempuan di Thailand sangat mirip dengan status perempuan di seluruh dunia, yaitu subordinat dibandingkan laki-laki, maka suami yang paling diharapkan untuk mempertahankan dan mendukung istri-istri mereka daripada yang diharapkan istri untuk mendukung suami mereka.

Ketika pihak yang berhak untuk menerima perawatan (biasanya ibu rumah



tangga dan anak-anak) belum dibayar jumlah yang bersangkutan atau telah membayar jumlah cukup untuk biaya hidup, ia dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk perintah memaksa pihak di bawah kewajiban menyediakan pemeliharaan (biasanya suami) untuk melakukan tugas. Jumlah pemeliharaan dipertimbangkan oleh pengadilan dengan memperhatikan kemampuan pihak yang memiliki tugas untuk menyediakan dan dalam kehidupan penerima atau keadaan kasus ini. Pemeliharaan dapat dibayar dengan pembayaran berkala dalam bentuk berupa uang atau lainnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Urutan pemeliharaan yang dibuat oleh pengadilan dapat dimodifikasi, dibatalkan, ditambah atau dikurangi jika keadaan telah berubah sejak perintah asli.

Hal ini biasanya terjadi bahwa suami mematuhi perintah pengadilan (dalam memberikan perawatan kepada istrinya bercerai dan anak-anak) untuk beberapa bulan pertama tapi kemudian menghentikan.

Suami yang jujur sesuai dengan urutan pemeliharaan sangat langka, maka istri-istri miskin selalu berpaling ke Pengacara Asosiasi Perempuan untuk bantuan. Berdasarkan Tata Undang-Undang Pengadilan Keluarga baru B.E. 114 artikel 2534 Mahkamah Keluarga memiliki kewenangan untuk memaksa majikan dari suami untuk membayar perawatan karena istri dari suami produktif langsung kepada istri. Sayangnya, untuk saat ini hanya ada 10 Pengadilan keluarga di kota-kota besar seperti Bangkok, Chaing Mai, Songkhla, Nakhon Rathasima, Ubon Ratchathani, Rayong dll dan ada 19 Provinsi seperti Nonthaburi, Samut Prakan, Pathum Thani dan Ayutthaya dll, yang memiliki bagian keluarga untuk menegakkan undang-undang Prosedur Pengadilan Keluarga. Ini adalah harapan bahwa



berfungsi menjadi landasan perkembangan politik dan budaya mereka. Walaupun tidak resmi karena ketika rancangan konstitusi dibuat pada tahun 1997 dan 2007, rancangan tersebut ditolak. Karena sejak setelah Islam masuk terjadi permasalahan trans-rasial di Thailand. Kondisi ini yang sering memicu minoritas Islam di Thailand yang ber-ras Malay (karena memang mereka berlokasi di bagian Selatan Thailand yang berbatasan dengan Malaysia), melakukan pemberontakan pada pemerintah pusat untuk mempertahankan eksistensi.

Identifikasi bahwa orang Thai Malay pasti Islam dan Thai pasti Budha ditandai sejak adanya agresi Bangkok's di Patani, Kedah, Trengganu, Kelantan dan Perlis yang dipimpin oleh raja Patani di kekaisaran Kelantan. Oleh karena itu Kerajaan Thailand mengambil model sistem hukum Malay Peninsula, yang memisahkan pengadilan Islam atau pengadilan adat untuk masalah-masalah yang ada hubungannya dengan agama, perkawinan dan kewarisan di Patani.

Islam di Thailand relatif pluralistis dalam karakter dan sangat dipengaruhi oleh negara tetangganya yaitu Malaysia. Sistem Pluralitis ini merupakan salah satu cara Islam untuk bisa berkembang di negara yang sekuler. Namun perbaikan Islam secara global dilakukan melalui politik, menggugah generasi muda Thai muslim untuk mengadopsi Islam yang murni, yang membawa nilai-nilai Islam dalam praktek maupun lembaganya masuk dalam kehidupan kaum muslim. Sehubungan dengan pelaksanaan Islam murni yang dibersihkan dari elemen tradisi non Islam demi menjadi Muslim yang baik tersebut, terlihat dari meningkatnya penggunaan terminologi keagamaan, membedakan gender, berpakaian muslim dan berhijab bagi perempuannya.

Sejak tahun 1920 Islam di Thailand terdapat dua wajah Islam yaitu tradisional dan reformis Islam. Tradisional Islam merepresentasikan *orientasi*



*sycretist* sedangkan reformis Islam berorientasi pada moral. Dari kondisi tersebut nampak menggambarkan bahwa Islam di Thailand justru semakin berorientasi pada kemurnian ajaran syariah, dan Islam di Thailand yang bermazhab Sunni sebagaimana negara-negara tetangganya terutama Malaysia sehingga untuk hukum keluarganya menerapkan hukum perkawinan yang sama pula.

### **Kendala-Kendala yang Timbul dalam Penerapan CEDAW dalam Hukum Keluarga Thailand Baik yang Non Muslim dan Muslim**

Adapun beberapa kendala yang timbul dalam penerapan CEDAW dalam hukum keluarga Thailand baik yang non muslim maupun muslim, sebagai berikut:

- a. Kondisi sosial budaya dan agama di Thailand yang mayoritas beragama Budha dan minoritas bergama Islam, dimana di kedua agama tersebut mengkonsepsikan asas perkawinan yang tidak monogami. Karena Poligyny masih tetap ada, sebagai akibat dari politik kekusaan kerajaan yang melegitimasinya sejak 1855 sampai dengan 1930 sebagai “ *Siam’s political masculine political culture and construction of masculine authority*”<sup>15</sup>. Selain itu polygyny juga telah mengakar di agama Budha di Thailand.<sup>16</sup>
- b. Tradisi di Thailand laki-laki didudukkan sebagai kepala rumah tangga (*Patrialchat*). Hal ini yang mengakibatkan dalam hal terjadi perceraian di mana orang tua tidak dapat setuju atas hak-hak pengasuhan, adalah sangat umum bagi hakim laki-laki untuk memberikan hak asuh ke ayah. Kewajiban suami menghidupi istri daripada sebaliknya.
- c. Tradisi masyarakat Thai menikah muda baik muslim dan non muslim. Usia menikah bagi mereka yang beragama Islam, pada dasarnya tidak ada batasnya.

---

15 Tamara Loos, 2006, “Subject Siam: Family, Law and colonial modernity in Thailand” Cornell University, Silkworm books, Bangkok, Thailand, hlm 110

16 *Ibid*, hlm 121



Terutama bagi mereka yang sudah *baligh*. Sehingga prakteknya pernikahan sering terjadi dilakukan di usia muda di bawah 17 tahun. Walaupun undang-undang Thailand menetapkan usia nikah 17 tahun.

- d. Di provinsi-provinsi selatan Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun, bagi Muslim diatur berdasarkan hukum keluarga dan warisan Islam, sedangkan negara sisanya ditentukan oleh hukum keluarga (Code Civil dan Komersial Kode, Buku 5 (Keluarga)). Pada tahun 1946 di Pattani, Narathiwat, Yala dan Satun berdasarkan Act, BE 2489, hukum keluarga dan warisan Islam diakui oleh negara karena alasan sejarah dan politik. Populasi yang dominan di daerah ini adalah Muslim Melayu yang telah berjuang untuk mempertahankan identitasnya.
- e. Bagi Masyarakat Muslim di Thailand Selatan, adanya pengaruh kebangkitan Islam di tingkat global juga mendorong umat Islam untuk berjuang dan menentukan eksistensinya diantara mereka yang mayoritas non-Muslim, dan pemerintah Thailand Tengah telah mencoba mengasimilasi budaya minoritas. Praktek berkelanjutan Muslim dan perkawinan non-Muslim di Thailand kemudian telah memimpin pemerintah dan lembaga untuk pelaksanaan pendidikan Islam di masyarakat Muslim. Otoritas keagamaan telah membuatnya wajib bagi mitra non-Muslim yang berencana untuk menikah seorang muslim dan yang karena itu harus dikonversi untuk memiliki pengetahuan dasar Islam sebelum menikah. Dengan kepatuhan terhadap adat dan kepercayaan Islam di kalangan Muslim dalam kegiatan sehari-hari, meningkatkan perhatian untuk studi Islam di kedua sistem sekolah tradisional Islam dan sekolah-sekolah nasional, akan menyulitkan penerapan kesetaraan. Sebagai contoh mereka yang tidak mau pergi untuk kursus sebelum nikah akan ada sanksi, dan anggota komite Muslim tidak akan melakukan ritual pemakaman atau lainnya untuk mengkonversi non-anggota keluarga mereka.



- f. Selain itu kebangkitan Islam berakibat muslim muda berusaha untuk mengadopsi bentuk-bentuk baru Islam murni dalam gaya hidup mereka di era modern. Kebangkitan menekankan identitas Islam dan kepatuhan terhadap kepercayaan Islam dan praktek, dengan beberapa gerakan pembersihan terhadap unsur-unsur non-Islam dari adat istiadat dan budaya. Sebagai contoh dulu yang berjilbab hanya mereka yang lebih tua, sekarang umum untuk melihat perempuan dari semua lapisan masyarakat memakai jilbab, gaun Malaysia, serta peningkatan dalam penggunaan istilah Arab agama, dan memakai bahasa Arab, Pakistan.
- g. Semakin banyak kelompok Muslim dan gerakan tradisionalis Islam mewakili kedua pandangan, yang lebih sinkretis di alam, serta Islam reformis, yang lebih puritan dan terkait dengan reformisme Salafi-Wahabi<sup>17</sup>. Beberapa gerakan ini telah agak kaku terhadap jender sehingga timbul kesalahpahaman pada nilai, dinamika, dan posisi pada hubungan jender dalam Islam, untuk memberdayakan perempuan.
- h. Adanya persepsi sosial bahwa kekerasan terhadap perempuan - terutama jika terjadi dalam keluarga adalah urusan pribadi. Banyak insiden tetap tidak dilaporkan dan terpercaya statistik tentang kekerasan domestik sulit diperoleh. Meskipun demikian, Organisasi Kesehatan Dunia studi pada tahun 2005 menunjukkan bahwa 41 persen wanita di Bangkok dan 47 persen wanita di daerah pedesaan telah mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangannya. Perkosaan adalah ilegal di Thailand, tapi hukum tidak menangani masalah perkosaan suami-istri. Perempuan dan anak perempuan juga mengalami risiko konstan menjadi korban perdagangan manusia dan seks komersial.

Kendala-kendala di atas tidak dapat terlepas dari sejarah politik, sosial, budaya, agama Thailand yang diketahui dan diakui sebagai sebuah negara

---

<sup>17</sup> Amporn Marddent, "Gendering Piety of Muslim Women in Thailand"



dominan Buddhisme. Agama negara yang berlaku adalah Buddhisme Theravada, walaupun tidak resmi karena ketika konstitusi sedang dirancang pada tahun 1997, Penyusunan Majelis Konstitusi menolak proposal untuk menetapkan Buddhisme sebagai agama resmi dengan alasan bahwa tindakan tersebut akan menciptakan pengaruh sosial dan bisa menyinggung perasaan komunitas agama lain di negara ini. Setelah adanya kudeta militer pada tanggal 19 September 2006 yang membatalkan piagam sebelumnya maka dalam piagam berikutnya secara resmi ditetapkan : Tidak ada Agama Negara<sup>18</sup>. Karena dengan adanya agama nasional dapat mengobarkan ketegangan dalam kerusuhan yang sedang berlangsung di provinsi Thailand Selatan, wilayah yang didominasi Muslim. Kebangkitan kekerasan di daerah ini telah meningkat pada bulan Januari 2004 sampai sekarang. Serangan itu telah menjadi semakin ditargetkan terhadap warga sipil. Representasi Muslim di Thailand Selatan telah berubah dalam banyak hal, terutama dalam bidang sosial-politik, budaya dan agama. Pada saat yang sama, banyak studi dan berita pada Muslim di Thailand Selatan telah difokuskan pada kekerasan dan dampaknya terhadap hubungan-Muslim dan Buddha hidup berdampingan di Thailand Selatan.

Selain itu kondisi Muslim di Thailand yang pluralistik, menurut Omar Farouk Muslim dibedakan antara dua jenis umat Islam yaitu 'berasimilasi' dan 'yang diasimilasikan'.<sup>19</sup> Yang pertama merupakan keragaman seluruh kelompok-kelompok etnis seperti Arab, yang Pathan, Thai-Melayu, dan lain-lain sementara itu, yang kedua didominasi Melayu yang tinggal di daerah tri-provinsi Narathiwat, Pattani dan Yala, bersama dengan tetangga Songkla. Umat Islam di provinsi Selatan adalah etnis Malaysia yang terbagi dari Thailand lain di negara Thailand yang disebut sebagai Islam "Thailand" atau "Thai Muslim". Selain itu, meningkatnya nasionalisme

<sup>18</sup> Bangkok Post, 30 Juni 2007

<sup>19</sup> Thanet Aphornsuvan, *History and Politics of the Muslim in Thailand*, Revised 12/2/03 <https://seap.einaudi.cornell.edu/sites/seap/files/MuslimThailand.pdf>



Malaysia di Asia Tenggara telah membagi etnis di Thailand selatan dengan Muslim dan non muslim. Thailand kemudian merangkul kemajemukan agama bukan dengan menggunakan istilah tertentu, walaupun agama Buddha adalah berkaitan erat dengan identitas Thailand. Dalam kasus Muslim Thailand, konsep perbedaan mereka adalah menekan pada perbedaan etnis, bahasa dan agama. Oleh karena itu, menjadi Melayu berarti menjadi Muslim, menjadi Thailand artinya menjadi Buddhis. Konsep etnis dan agama dibawa bersama-sama untuk menentukan identitas Muslim di Thailand.

Kondisi ini semakin ekstrim lagi dengan pengaruh kebangkitan Islam di tingkat global yang menarik umat Islam berjuang untuk eksistensi mereka dalam keadaan berada di mayoritas non-Muslim. Kaum Muslim muda Thailand, mengadopsi bentuk-bentuk baru Islam murni. Fenomena ini membawa kembali nilai-nilai Islam, praktik, dan lembaga ke dalam kehidupan umat Islam. Kebangkitan menekankan pada identitas Islam dan kepatuhan berkaitan dengan kepercayaan dan praktek. Ada beberapa gerakan ke arah mencari Islam yang benar dalam beberapa dekade terakhir dan pembersihan unsur-unsur tradisi-tradisi non-Islam. Proses ini telah disertai dengan keinginan untuk menjadi muslim yang baik. Hal ini tercermin dari peningkatan penggunaan istilah bahasa Arab agama, segregasi antara jenis kelamin, dan memakai bahasa Arab, Pakistan, dan gaun Malaysia serta mencakup jilbab di kalangan wanita.

Namun demikian pergerakan aktivis perempuan muslim di Thailand juga ada sebagaimana perempuan-perempuan muslim di dunia. Banyak perempuan muda menjadi aktivis perempuan, mempromosikan kesetaraan gender yang berdasarkan Islam. Tapi ditemukan juga bahwa beberapa gerakan yang agak kaku gender dan terjadi kesalahpahaman nilai, dinamis, dan hanya posisi pada relasi gender dalam Islam. Selain itu, perempuan muda di Thailand muncul untuk melihat diri mereka di luar lingkup hukum dan prinsip Islam.



## PENUTUP

### Kesimpulan

Uraian ulasan kajian yang sudah dijelaskan di atas, pada akhirnya Peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan CEDAW di dalam peraturan perundang-undangan Thailand telah sinkron, yang artinya secara *de Jure* CEDAW telah di terapkan dalam *Code Civil of Thailand* yang di dalamnya terdapat *Family Law*; lebih khusus lagi tentang *Marriage* (Perkawinan). Terbukti dengan mensinkronkan isi Pasal 16 a CEDAW tentang *Equity in marriage and family relation* (hak yg sama untuk memasuki jenjang perkawinan) dengan *Code Civil Buku V Title I Marriage Chapter I Betrotal dan II Conditions of Marriage* yang terdiri dari *Section* 1435 sampai dengan 1464 mengatur tentang hak memasuki jenjang perkawinan di Thailand. Dari kajian kedua sumber tersebut terjawab bahwa hukum Keluarga Thailand memperhatikan hak yang sama antara calon suami dan isteri dalam jenjang perkawinan. Namun bagi Masyarakat Thailand selatan yang muslim hukum keluarga/ perkawinan dan kewarisannya menggunakan ketentuan syariah yang dalam memasuki jenjang perkawinan meninggikan hak laki-laki sebagai imam/ kepala rumah tangga sesuai beban kewajibannya yang juga berat.
2. Walaupun secara *de jure* ketentuan hukum keluarga Thailand yang sekuler telah menerapkan CEDAW, sebagaimana negara tetangga Thailand di ASEAN yang masyarakatnya plural ada yang mayoritas non Muslim, maupun yang mayoritas muslim seperti Malaysia, Philipina, Indonesia. Faktor Sosial, Budaya, Politik dan Agama mempengaruhi pelaksanaan CEDAW/ peraturan perundangan yang memperhatikan dan melindungi perempuan. Secara *de facto* budaya Patriachat/ patrilineal yang mengakar, baik pada agama Budha maupun Islam di Thailand



Selatan, tidak sedikit mempengaruhi pelaksanaan ketentuan hukum, sehingga secara *de facto* tidak mudah dilaksanakan.

## Rekomendasi

Hal yang dapat direkomendasikan bagi peraturan perundangan Indonesia dari hasil analisis terhadap Code Civil Thailand atas implementasi CEDAW Pasal 16a, baik secara *de jure* dan *de facto* dapat direkomendasikan sebagai berikut :

1. Hukum keluarga di Indonesia sebagaimana di Thailand seyogyanya tetap dapat menampung keragaman agama dan adat masyarakatnya. Karena Pluralisme hukum khususnya yang berhubungan dengan hukum keluarga dan waris adalah suatu keniscayaan dalam suatu wilayah yang heterogen. Unifikasi hukum tidak dapat dipaksakan tanpa memperhatikan nilai-nilai etis, norma sosial dan budaya sebagaimana teori pluralisme Triangular Concept of legal Pluralism dari Werner Menski, yang menurutnya hukum sebagai fenomena global memiliki kesamaan di seluruh dunia, dalam arti bahwa hukum dimana-mana terdiri dari atas dasar nilai etis, norma-norma sosial dan aturan-aturan yang dibuat oleh negara, meskipun tentu saja di dalam realitasnya, muncul banyak sekali variasi kultur yang lebih spesifik. Konsep ini dikenal dengan konsep segitiga pluralisme hukum (*triangular concept of legal pluralism*) dimana Menski mengkombinasikan secara interaktif teori hukum alam modern, positivism dan sosiologi hukum untuk membahas mengenai pluralism hukum yang merupakan realitas dunia global.<sup>20</sup> Jadi hukum menurut Menski harus dilihat secara utuh satu kesatuan yang utuh terdiri dari: hukum yang produk negara, hukum yang lahir dari masyarakat dan nilai-nilai moral, keagamaan serta etik (ketiga pilar itulah yang disebut hukum yang utuh).

---

20 Achmad Ali, 2009, *Op.Cit.*, hlm. 184



2. Mengenai hak memasuki jenjang perkawinan yang sama, sesungguhnya ketentuan yang berlaku di Thailand dan Indonesia hampir serupa. Namun ada hal menarik yang dapat dimasukkan dalam UUP adalah mengenai perlindungan dalam masa pertunangan. Karena di Indonesia secara budaya juga memiliki budaya pertunangan, sehingga hal tersebut cukup relevan untuk direkomendasikan. Selain itu usia kebolehan seseorang menikah tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, kalau di Thailand 17 tahun, Peneliti mengusulkan tidak dibedakan laki-laki dan perempuan dengan usia minimum 21 tahun agar secara biologis, psikis dan materil/ ekonomi sudah benar-benar matang untuk berkeluarga.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana Prenada Media group, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Tamara Loos, 2006, *Subject Siam: Family, Law and colonial modernity in Thailand*, Cornel University, Silkworm books, Bangkok, Thailand.

### Peraturan perundang-undangan:

Code Civil and Commercial Code, Article 1435.

Code Civil and Commercial Code, Article 1436.

Code Civil and Commercial Code, Article 1437.

Code Civil and Commercial Code, Article 1439.

Code Civil and Commercial Code, Article 1445.

Code Civil and Commercial Code, Article 1443.

Civil and Commercial Code, Article 1448.

Civil and Commercial Code, Article 1454.

Civil and Commercial Code, Article 1450.

Supreme Court Decision, No. 1971/2517.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP)



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. (Konvensi perempuan/ wanita atau CEDAW= *Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women*).

**Surat Kabar:**

Bangkok Post, 30 Juni 2007.

**Internet:**

ByWimolsiriJamnarnwej(<http://www.thailawforum.com/articles/familywimol7.html>) part 2.Amporn Marddent, “*Gendering Piety of Muslim Women in Thailand*”.

Wimolsiri Jamnarnwej, *Family Law of Thailand* <http://www.thailawforum.com/articles/familywimol7.html>, Associated Professor of Law, Dean Faculty of law, Saint John’s University, Former Minister of Office of Universities Affairs.

Thanet Aphornsuvan, *History and Politics of the Muslim in Thailand*, Revised 12/2/03  
<https://seap.einaudi.cornell.edu/sites/seap/files/MuslimThailand.pdf>.